

Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa

**Stefi Maria Sumarauw
Joyce J. Rares
Burhanuddin Kiyai**

ABSTRACT : *The Earth and building tax is a direct tax that is withheld by the Central Government, but the results received are intended for community interests in the area corresponding to the layout and the tax object. The existence of tendencies and a sense of reluctance from some community Districts that pay taxes in Eris views from various things relating to public awareness itself due to a weak economy that factor in the work of inner as farmers, the Bill that is not in accordance with the objects of taxation and there are people who deliberately don't want to pay UN.. Therefore, this research aims to know the influence of the leadership of the Head of community awareness in the Earth and buildings to pay taxes.*

The independent variables (free) in this study was leadership of (X) is a capacity that has the ability to affect or right to steer, or encourage a person to do everything which is the wisdom or a command for a particular purpose. The dependent variable (tied) in the penenlitian this is the awareness of UN Pay as a Variable (Y) the existence of public awareness will encourage a strong desire to improve and develop common interests in order to achieve a better life. The type of research used in this study is a research method of quantitative analysis with descriptive statistics, with a view to seeking influences between the dependent variable and independent variable.

Overall analysis of the results indicates that the leadership of the Head has a positive influence on the Awareness of society in the pay of the UN in the Sub-District of Eris. As the results of this research as well as the theoretical opinion then it can be stated that the leadership of the Head has a positive influence on the Awareness of society in the pay of the UN.

Keywords: *Head Of Leadership, Community Awareness In Pay The Earth and building tax*

PENDAHULUAN

Adanya pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan pelaksanaan yang membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunannya. Untuk mendukung jalannya penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta

perimbangan keuangan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu. Dan dari semua itu diwujudkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah

permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis-jenis pajak potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga merupakan salah satu sumber daya yang sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunannya. Tujuan utama Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan serta meningkatkan kemandirian daerah dari potensi yang ada. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peranan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia sangat penting, karena sebagian penerimaan Negara, Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan jika dilaksanakan semakin cepat maka hasilnya semakin baik. Untuk meningkatkan penarikan Pajak Bumi dan

Bangunan dibutuhkan adanya kesadaran tinggi dari masyarakat sebagai wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada Undang-Undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran dalam keikutsertaan dalam menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak dan Bangunan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang dan bahkan tidak mengerti pajak, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB sangat penting maka untuk meningkatkan penerimaan Negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib pajak itu sendiri.

Anggapan yang salah oleh masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan akan sangat merugikan bagi negara, oleh karena itu dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali hambatan-

hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat masyarakat wajib pajak menjadi sadar, serta mau dan mampu membayar pajak. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat mengenai pajak merupakan langkah yang paling penting dalam mensosialisasikan pajak tersebut.

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada hal-hal yang terkait dengan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, maka peneliti mengambil Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa sebagai tempat penelitian. Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa yang dikenal dengan pengelolaan pajak Bumi dan Bangunannya berjalan baik, tidak luput dari adanya masalah dalam pembayaran PBB oleh masyarakatnya. Adanya kecenderungan dan rasa enggan dari sebagian masyarakat Kecamatan Eris dalam membayar pajak tersebut dilihat dari berbagai hal yang menyangkut akan kesadaran masyarakat itu sendiri dikarenakan faktor perekonomian yang lemah yang pekerjaannya bermayoritas sebagai petani, adanya tagihan yang tidak sesuai dengan objek pajak dan terdapat masyarakat yang dengan sengaja tidak mau membayar PBB. Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan pengaruh kepemimpinan Camat sebagai kepala pemerintahan terdepan serta pemerintah-pemerintah yang ada di kecamatan Eris untuk memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya serta masyarakat yang ada agar dapat menjalankan

kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan yang dalam pemungutan pajak. Menurut Stoner (1982), kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Dalam Ensiklopedi Administrasi, *leadership* (kepemimpinan) adalah proses pengaruh mempengaruhi antara pribadi atau antara orang dalam situasi tertentu, melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maxwell dalam Pasolong (2011:110), mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh pengikut. James L. Gibson dkk dalam Pasolong (2011:110), mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Definisi Gibson mengisyaratkan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan. Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi kepemimpinan merupakan aspek yang paling nyata dari kegiatan manajemen. Hambatan dalam pemungutan PBB bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karena

kondisi masyarakat yang kurang sadar dalam membayar PBB atau bahkan tidak tau tentang seluk beluk fungsi dan manfaat dari pembayaran pajak itu sendiri.

Menurut Soemitro (1992:75), bahwa Pajak Bumi dan Bangunan di singkat PBB, adalah pajak atas harta tak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan, sebenarnya sudah tercakup oleh pajak kekayaan,, sehingga jika PBB dipungut disamping pajak kekayaan akan mencakup pungutan pajak ganda. Menurut Munawir (1994:308), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil penerimaan hasil pajak ini diarahkan kepada tujuan kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan objek oajak sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Menurut Soemitro dan Muttaqin (2001:5), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadiam subjei tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Menurut Sri dan Suryo (2003:1), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu kegiatan adminisitrasi dalam pemerintahan Indonesia yang di desentralisasi ke daerah. Pajak ini merupakan penerimaan daerah yang merupakan pembagian dari pemerintah pusat. Penerapan

atau pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang dimaksudkan dengan bumi, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, yaitu “ Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya”. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan tubuh bumi adalah segala yang dikandungnya yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Adapun yang dimaksudkan dengan bagunan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 adalah “Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan”. Bangunan disini diperuntukkan bagi tempat tinggal, temapt usaha dan tempat yang di usahakan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang di kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa PBB merupakan pajak atas bumi dan bangunan atau iuran rakyat kepada neagara yang diambil berdasarkan obyek pajak berupa tanah atau perairan, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintah.

Dari pengaruh kepemimpinan tersebut dapat menjadi penggerak maupun pendorong bagi masyarakat sebagai wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Eris. Camat juga merupakan tokoh yang disegani oleh masyarakat.

Iniilah yang mendorong penulis sehingga ingin melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”**

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan analisa statistik deskriptif, dengan maksud untuk mencari pengaruh antara variable independen dengan variable dependen.

B. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Konsep

Konsep merupakan istilah dan definisi yang digunakan untuk memnggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial (Singarimbun 1995:33)

- a. Variabel Independen (bebas) dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan Camat (X).

Kepemimpinan merupakan suatu kapasitas yang mempunyai kemampuan mempengaruhi atau hak untuk mengarahkan, atau mendorong seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang merupakan kebijaksanaan atau perintah untuk tujuan tertentu.

- b. Variabel Dependen (terikat) dalam penenlitian ini adalah Kesadaran

Masyarakat Membayar PBB sebagai Variabel Terikat (Y).

Kesadaran Masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan mampu untuk menyeimbangkan, menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh adanya etika moral masyarakat tersebut. Adanya kesadaran masyarakat akan mendorong keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk mempermudah operasional kerangka teori yang telah diajukan sebelumnya. Menurut Masri Singarimbun (1989:46) definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur satu variabel sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja yang menjadi pendukung untuk dianalisa dari variabel-variabel tersebut.

- a. Variabel Kepemimpinan (X) Faktor-faktor kepemimpinan transformasional (Bass) adalah sebagai berikut:

- 1) Kharismatik (*charismatic*)
- 2) Inspirasi (*Inspirational Motivation*)
- 3) Rangsangan Kecerdasan (*Intellectual Stimulation*)
- 4) Perhatian individu (*Individualized Consideration*)

- b. Variabel Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB (Y), faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sebagai berikut :
 - a. Tingkat pendidikan dan pengetahuannya tentang tujuan adanya PBB
 - b. Kehidupan ekonomi masyarakat, apakah ia mampu atau tidak untuk membayar PBB
 - c. Petugas dalam menagih PBB
 - d. Usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB
 - e. Keadilan perlakuan bagi wajib pajak, disesuaikan dengan kemampuan membayar dari masyarakat.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, :2014:115). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat di Kecamatan Eris.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2014:116). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling kuota. Sampling Kuota yaitu suatu teknik penentuan sampel berdasarkan atas quota atau penjatahan (Pasolong 2013:108).

Menurut Kennet D. Baliley dalam Pasolong 2012:112 memberikan rujukan bahwa jumlah sampel minimum 100 responden, jika penelitian ingin menggunakan perhitungan statistik. Dan sampel dalam penelitian ini adalah 100.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap sejumlah acuan yang berkenaan dengan topik penelitian ke lokasi penelitian, dalam hal ini adalah Kecamatan Eris

b. Metode Angket

Yaitu teknik pengumpulan data melalui pemberian daftar pertanyaan secara tertutup kepada responden yang dilengkapi dengan beberapa alternative jawaban.

c. Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui :

1) Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, dokumen, majalah dan berbagai bahan yang berhubungan dengan objek penelitian.

2) Studi Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

1. Untuk mengetahui koefisien korelasi variable X terhadap Y digunakan rumus Korelasi Product Momen (Sugiyono, 2014 : 248) :

$$r_{xy} = \frac{n \sum XiYi - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{\{n \sum Xi^2 - (\sum Xi)^2\} \{n \sum Yi^2 - (\sum Yi)^2\}}}$$

r = Koefisien Korelasi

x = Variabel bebas

y = Variabel terikat

n = jumlah sampel

Dari hasil perhitungan tersebut akan memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

- a. Koefisien korelasi yang diperoleh sama dengan nol ($r=0$) berarti hubungan kedua variabel yang diuji tidak ada.
- b. Koefisien korelasi yang diperoleh positif ($r=+$) berarti kenaikan nilai variabel yang satu, diikuti nilai variabel yang lain dan

kedua variabel memiliki hubungan positif.

- c. Koefisien korelasi yang diperoleh negatif ($r=-$) berarti kedua variabel negative dan menunjukkan meningkatnya variabel yang satu diikuti menurunnya variabel yang lain.

Dengan nilai r yang diperoleh maka dapat diketahui apakah nilai r yang diperoleh berarti atau tidak dan bagaimana tingkat hubungannya melalui tabel korelasi. Tabel korelasi menentukan batas-batas r yang signifikan. Bila r tersebut signifikan, artinya hipotesis kerja atau hipotesis alternative dapat diterima.

2. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pola hubungan pengaruh dari variabel bebas Kepemimpinan Camat (Variabel X) terhadap Variabel terikat peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB (Variabel Y). Pola hubungan pengaruh dinyatakan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y' = Kesadaran Masyarakat Membayar PBB

a = Nilai Konstan

b = Koefisien Regresi

X = Kepemimpinan Camat

Untuk menghitung nilai konstan variabel terikat Y apabila variabel X tidak berubah atau tetap, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

untuk menghitung nilai koefisien arah regresi variabel Y atas variabel X, yaitu besar perubahan pada nilai variabel Y yang disebabkan atau diakibatkan oleh perubahan pada variabel X, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis sederhana untuk mengetahui pola hubungan pengaruh variabel kepemimpinan Camat terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Eris didapat $\hat{Y} = 21,5092 + 0,2093X$. Koefisien arah regresi (b) = 0,2093 mempunyai makna bahwa hubungan pengaruh variabel kepemimpinan Camat (X) terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Eris ialah positif sebesar 1 : 0,2093 yang artinya pertambahan atau perubahan pada kepemimpinan Camat sebesar 100 skala akan menyebabkan perubahan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Eris sebesar 20,93 skala.

Selanjutnya koefisien konstanta (a) = 21,5092 mempunyai makna jika kepemimpinan Camat bersifat tidak berubah atau tetap/konstanta sesuai dengan kondisi sekarang maka kesadaran masyarakat dalam membayar PBB hanya akan sebesar 21,5092 skala. Nilai koefisien konstanta ini memberikan gambaran apabila tidak ada perubahan Kepemimpinan Camat maka akan sulit mengharapkan kesadaran yang signifikan pada kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Eris.

Dari hasil data analisis tersebut maka persamaan regresi linear analisis data penelitian ini yaitu $\hat{Y} = 21,5092 + 0,2093X$ dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan yang akan terjadi pada variabel terikat (kesadaran masyarakat dalam membayar PBB) apabila nilai variabel bebas (kepemimpinan camat) diketahui, dan apabila dengan metode interpolasi dengan memasukan nilai score maksimum hasil pengamatan variabel X sebesar 37 maka Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB (\hat{Y}) akan diperoleh :

$$\hat{Y} = 21,5092 + 0,2093(37) = 29,2533$$

Hasil perhitungan ini mempunyai pengertian jika Kepemimpinan Camat ditingkatkan sebesar nilai rata-rata variabel (X) hasil pengamatan (37), maka diharapkan Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB akan menjadi sebesar 29,2533 skala. Dari hasil analisis koefisien korelasi (hubungan) variabel kepemimpinan camat terhadap variabel kesadaran masyarakat dalam

membayar PBB di Kecamatan Eris yaitu koefisien korelasi (r) sebesar 0,3834 $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian koefisien korelasi dinyatakan signifikansi dengan koefisien determinasi (r^2) = 0,1470. Dengan demikian pengaruh Kepemimpinan Camat terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sebesar 14,70% dan sisanya ditentukan oleh faktor-faktor yang lain.

Berdasarkan perhitungan, maka dinyatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan ditolak, dan hipotesis alternative (H_a) diterima.

Maka berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dan korelasi sederhana memperlihatkan bahwa ternyata kepemimpinan Camat memiliki hubungan pengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Eris. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “Kepemimpinan Camat berpengaruh secara positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Eris”, dapat diterima secara meyakinkan meyakinkan dimana sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 orang yang diwakili oleh masyarakat yang berada di 3 desa yaitu, desa Eris, Tandengan dan Touliang Oki.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Dilihat dari indikator Kepemimpinan Camat yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Kharismatik, Inspirasi, Rangsangan Kecerdasan, Perhatian individu menunjukkan bahwa Kepemimpinan Camat di Kecamatan Eris untuk mempengaruhi masyarakat dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan.
2. Begitu juga dengan Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada dasarnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah cukup baik tetapi perlu ditingkatkan. Dengan adanya usaha dari Camat sebagai pemimpin tentunya akan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan
3. Analisis regresi sederhana dan Koefisien Korelasi dari variabel Kepemimpinan Camat terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan Camat mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Eris.

B. Saran

Beranjak dari hasil penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan beberapa saran sebagai solusi atas permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Camat Kecamatan Eris harus lebih aktif mengajak masyarakat dalam berpartisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan tentunya bekerja sama dengan para Hukum Tua di masing-masing desa, agar supaya partisipasi masyarakat dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan lebih meningkat.
2. Untuk indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebaiknya diperhatikan kembali untuk dapat dicari solusinya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pembangunan daerah sebaiknya Camat berkoordinasi dengan para Hukum Tua pada masing-masing desa menunjukkan insentif pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Munawir. 1994, *Perpajakan*, Yogyakarta, Liberty
- Pasolong, Harbani. 2013, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung: ALFABETA
- Purwadarminta, WJS. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Santoso Brotodiharjo. 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. ERESCO
- Siagian, Sondang P. 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Singarimbun. 1989, *Metode Penelitian Survey. Edisi Revisi*, Jakarta : LP3ES
- Soemitro dan Muttaqin. 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan (Cetakan Ke 3)*, Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen cetakan 10*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Thoha, Miftah. 2012, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tondok, Marselius Sampe dan Rita Andarika. 2004. *Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional dengan Kepuasan Kerja Karyawan*. Palembang: Fakultas Psikologi Universitas Bima Darma.
- Valentina Sri dan Aji Suryo. 2003, *Perpajakan Indonesia; Seri Belajar untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Wirjana. 2006, *Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi

Wiwoho B. (Editor). 1990, *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*, Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.